PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2025, Vol. 3, No. 1, pp. 9-17
E-ISSN: 3025-9452

Kebijakan Publik dan Ketimpangan Akses Pendidikan Digital pada Masa Pasca Pandemi Covid-19

Nabila Putri Maharani[1]✉, Roni Saputra[2]
(1,2) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Abstrak: Masa pasca pandemi Covid-19 menandai percepatan adopsi pendidikan digital melalui kebijakan pembelajaran jarak jauh dan hibrida. Namun, percepatan ini juga memperlihatkan ketimpangan akses pendidikan digital yang persisten antar kelompok sosial ekonomi. Artikel ini menganalisis peran kebijakan publik dalam membentuk ketimpangan akses pendidikan digital pada periode pasca pandemi. Kajian ini menelaah bukti empiris dari literatur internasional dan komparatif terkait kebijakan pendidikan digital, kesenjangan akses teknologi, dan implikasinya terhadap keadilan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada perluasan platform digital tanpa dukungan infrastruktur, literasi digital, dan perlindungan kelompok rentan cenderung memperkuat eksklusi pendidikan. Rumah tangga berpendapatan rendah, wilayah dengan konektivitas terbatas, dan institusi pendidikan dengan kapasitas fiskal rendah mengalami hambatan berlapis dalam mengakses pembelajaran digital berkualitas. Artikel ini menegaskan bahwa kebijakan publik pasca pandemi perlu bergeser dari pendekatan darurat menuju kebijakan struktural yang berorientasi pada pemerataan akses dan kualitas. Integrasi kebijakan pendidikan, telekomunikasi, dan perlindungan sosial menjadi prasyarat untuk menekan ketimpangan pendidikan digital secara berkelanjutan.

Article history:
Received: 02 January 2025
Revised: 20 January 2025
Accepted: 19 February 2025
Published: 23 February 2025

Kata Kunci:
kebijakan publik, pendidikan digital, ketimpangan akses, pasca pandemi, Covid-19

Abstract: *The post-COVID-19 pandemic period has marked an acceleration in the adoption of digital education through distance and hybrid learning policies. However, this acceleration has also revealed persistent inequalities in access to digital education across socioeconomic groups. This article analyzes the role of public policy in shaping inequalities in access to digital education in the post-pandemic period. The study examines empirical evidence from international and comparative literature on digital education policies, the gap in technology access, and their implications for educational equity. The analysis shows that policies focused on expanding digital platforms without supporting infrastructure, digital literacy, and protecting vulnerable groups tend to reinforce educational exclusion. Low-income households, areas with limited connectivity, and educational institutions with low fiscal capacity face multiple barriers to accessing quality digital learning. This article emphasizes that post-pandemic public policy needs to shift from an emergency approach to structural policies oriented toward equitable access and quality. Integration of education, telecommunications, and social protection policies is a prerequisite for sustainably reducing inequalities in digital education.*

Keyword:
public policy, digital education, inequality of access, post-pandemic, Covid-19

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Maharani, N. P., & Saputra, R. (2025). Kebijakan Publik dan Ketimpangan Akses Pendidikan Digital pada Masa Pasca Pandemi Covid-19. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *3*(1), 9–17. https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i1.433

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memicu perubahan mendasar dalam sistem pendidikan global. Penutupan sekolah dan pembatasan mobilitas memaksa pemerintah mengadopsi pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi digital sebagai solusi darurat. Setelah fase krisis berlalu, banyak negara mempertahankan praktik pendidikan digital dalam bentuk hibrida dan daring. Fase pasca pandemi ini menandai pergeseran kebijakan dari respons sementara menuju pengaturan jangka menengah dan panjang.

✉ *Corresponding author: nabilaputri.maharani@gmail.com*
Copyright © 2025, the author(s)

Namun, transisi tersebut juga memperlihatkan ketimpangan akses pendidikan digital yang belum terselesaikan secara sistematis.

Ketimpangan akses pendidikan digital merujuk pada perbedaan kemampuan individu dan institusi dalam mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari teknologi pembelajaran. Ketimpangan ini tidak hanya terkait ketersediaan internet dan perangkat, tetapi juga mencakup literasi digital, dukungan kebijakan, serta kapasitas ekonomi rumah tangga dan sekolah. Walters (2020) menunjukkan bahwa pandemi memperbesar ketimpangan pendidikan yang telah ada, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Temuan ini relevan pada masa pasca pandemi, ketika pendidikan digital tidak lagi bersifat opsional, tetapi menjadi bagian dari sistem pendidikan reguler.

Kebijakan publik memainkan peran sentral dalam menentukan arah dan dampak pendidikan digital. Li (2024) menekankan bahwa inovasi pendidikan jarak jauh pasca pandemi membutuhkan penyesuaian kebijakan yang melampaui pendekatan darurat. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas, adopsi teknologi berisiko memperkuat kesenjangan akses. Hargreaves (2021) menyoroti bahwa tekanan fiskal dan kebijakan penghematan pasca pandemi dapat mengurangi kemampuan negara menjamin pemerataan pendidikan. Kondisi ini berpotensi memperlemah komitmen terhadap keadilan pendidikan di era digital.

Bukti empiris menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan digital bersifat lintas wilayah dan lintas tingkat pendidikan. Kelly dan Rutazihana (2024) menemukan bahwa di Afrika Sub-Sahara, keterbatasan infrastruktur dan biaya konektivitas menjadi penghambat utama pembelajaran daring pasca pandemi. Studi serupa di Amerika Latin menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan digital sering kali tidak sejalan dengan kondisi sosial ekonomi lokal, sehingga memperbesar eksklusi pendidikan (Prince Torres, 2024). Pola ini menegaskan bahwa kebijakan publik memiliki dampak distribusional yang signifikan.

Di tingkat pendidikan tinggi, Ali dan Katz (2024) menunjukkan bahwa intervensi kebijakan berbasis bukti mampu mempersempit kesenjangan akses digital. Namun, keberhasilan tersebut bergantung pada integrasi antara kebijakan institusional, dukungan finansial, dan desain teknologi yang inklusif. Tanpa integrasi tersebut, pendidikan digital cenderung menguntungkan mahasiswa dengan sumber daya lebih besar. Hernández Suarez et al. (2023) mencatat bahwa mahasiswa dari keluarga berpendapatan rendah mengalami penurunan kualitas pembelajaran selama dan setelah pandemi akibat keterbatasan akses teknologi.

Pada pendidikan dasar dan menengah, ketimpangan akses memiliki implikasi jangka panjang terhadap mobilitas sosial. Kanashiro (2021) dan Wickert et al. (2021) menegaskan bahwa akses internet menjadi prasyarat pemenuhan hak atas pendidikan selama pandemi. Pada fase pasca pandemi, prasyarat ini tetap relevan karena pembelajaran digital masih digunakan untuk pengayaan dan remediasi. Ketika kebijakan publik gagal menjamin akses yang setara, ketimpangan pembelajaran berpotensi terakumulasi sejak usia dini.

Literatur tentang kesenjangan digital menekankan bahwa ketimpangan tidak berhenti pada akses fisik. Ahuja (2023) dan Ojong (2025) menyoroti dimensi keterampilan dan dukungan sosial sebagai faktor penentu keberhasilan pendidikan digital. Peserta didik dengan lingkungan rumah yang mendukung dan literasi digital tinggi memperoleh manfaat lebih besar dari teknologi pembelajaran. Sebaliknya, peserta didik dari keluarga rentan menghadapi hambatan berlapis yang sulit diatasi tanpa intervensi kebijakan yang terarah.

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Analisis kebijakan komparatif menunjukkan variasi pendekatan negara dalam mengatasi ketimpangan pendidikan digital. Genç Tetik dan Akın (2023) menunjukkan bahwa negara dengan kerangka kebijakan terkoordinasi antara sektor pendidikan dan teknologi mampu menjaga prinsip kesetaraan kesempatan. Souza (2023) menekankan pentingnya kebijakan berorientasi misi yang secara eksplisit menargetkan pengurangan ketimpangan pendidikan melalui teknologi. Pendekatan ini menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama, bukan sekadar efek samping digitalisasi.

Kajian sistematis juga mengungkap bahwa banyak kebijakan pasca pandemi masih bersifat fragmentaris. De França dan Furlin (2023) serta Tang et al. (2024) mencatat bahwa produksi kebijakan dan praktik pendidikan digital sering tidak selaras dengan bukti ilmiah tentang kelompok yang paling terdampak. Barros et al. (2023) menunjukkan bahwa inklusi digital dalam pendidikan memerlukan kombinasi kebijakan akses, pelatihan, dan dukungan berkelanjutan. Tanpa kombinasi tersebut, ketimpangan akses tetap bertahan meskipun teknologi tersedia.

Isu hak atas pendidikan dan akses internet sebagai hak fundamental juga menguat dalam diskursus pasca pandemi. Studi dalam KAIRÓS (2022) dan Althausen (2025) menegaskan bahwa pendidikan digital tidak dapat dilepaskan dari kerangka hak asasi dan kewajiban negara. Ketika akses digital tidak dijamin, negara berisiko melanggar prinsip kesetaraan substantif. Perspektif ini menempatkan kebijakan pendidikan digital sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional, bukan sekadar inovasi administratif.

Penelitian terbaru menyoroti perlunya pendekatan inklusif dalam lingkungan belajar berbasis teknologi. Thapaliya dan Panta (2025) serta Song (2025) menunjukkan bahwa perbedaan tingkat akses teknologi terus memperlebar kesenjangan hasil belajar pada fase pasca pandemi. Passey et al. (2024) mengidentifikasi kelompok yang secara sistematis tereksklusi dari pendidikan digital, termasuk rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, dan wilayah terpencil. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan universal tanpa diferensiasi berisiko tidak efektif.

Meskipun banyak studi membahas kesenjangan pendidikan digital, kajian yang secara khusus mengaitkan kebijakan publik dengan ketimpangan akses pada masa pasca pandemi masih terbatas. Ramírez-Correa et al. (2025) menekankan perlunya integrasi antara pendidikan digital, keberlanjutan, dan inklusi sosial. Leigue et al. (2025) menunjukkan bahwa kebijakan inklusi pendidikan jarak jauh membutuhkan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan dampak distribusionalnya. Kallon (2023) menambahkan bahwa krisis global memperlihatkan bagaimana teknologi dapat memperdalam atau mengurangi ketimpangan, tergantung desain kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa masa pasca pandemi merupakan fase kritis bagi arah kebijakan pendidikan digital. Keputusan kebijakan pada periode ini akan menentukan apakah pendidikan digital menjadi instrumen pemerataan atau sumber ketimpangan baru. Ketimpangan akses tidak dapat dipahami sebagai masalah teknis semata, tetapi sebagai konsekuensi dari pilihan kebijakan publik.

Artikel ini bertujuan menganalisis peran kebijakan publik dalam membentuk ketimpangan akses pendidikan digital pada masa pasca pandemi Covid-19. Fokus analisis diarahkan pada mekanisme kebijakan yang memengaruhi akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan digital bagi kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Artikel ini berkontribusi dengan menyintesis temuan empiris dan kebijakan internasional untuk memperkuat dasar konseptual dan praktis bagi perumusan kebijakan pendidikan digital yang lebih adil dan akuntabel.

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian literatur sistematis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara kritis hubungan antara kebijakan publik dan ketimpangan akses pendidikan digital pada masa pasca pandemi Covid-19. Fokus penelitian diarahkan pada bukti empiris yang relevan, mutakhir, dan memiliki dasar teoritis yang kuat dalam kajian kebijakan pendidikan dan kesenjangan digital.

Sumber data penelitian berasal dari artikel jurnal internasional bereputasi yang terbit pada periode 2020 hingga 2025. Pemilihan rentang waktu ini bertujuan menangkap dinamika kebijakan pendidikan digital selama dan setelah pandemi. Artikel dikumpulkan dari basis data ilmiah utama seperti Scopus dan Web of Science, dengan mempertimbangkan relevansi topik, kualitas metodologis, dan keterkaitan langsung dengan isu ketimpangan akses pendidikan digital.

Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci yang mencakup public policy, digital education, digital divide, post-pandemic, dan Covid-19. Kombinasi kata kunci disesuaikan untuk memastikan ketercakupan studi lintas wilayah dan tingkat pendidikan. Artikel yang tidak membahas kebijakan publik atau tidak menyajikan temuan empiris terkait akses pendidikan digital dikeluarkan dari analisis.

Kriteria inklusi meliputi studi empiris dan kajian kebijakan yang menganalisis dampak kebijakan pendidikan digital terhadap akses, partisipasi, atau hasil belajar. Kriteria eksklusi mencakup artikel konseptual murni tanpa data pendukung dan publikasi non akademik. Proses seleksi dilakukan melalui penyaringan judul, abstrak, dan teks penuh untuk menjaga konsistensi dan validitas analisis.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik. Setiap artikel yang terpilih dikodekan berdasarkan fokus kebijakan, konteks sosial ekonomi, dan bentuk ketimpangan akses yang diidentifikasi. Tema utama disusun secara induktif untuk menangkap pola kebijakan yang berkontribusi pada pengurangan atau reproduksi ketimpangan pendidikan digital. Proses ini memungkinkan sintesis lintas studi tanpa menghilangkan konteks spesifik masing-masing penelitian.

Untuk menjaga keandalan analisis, penelitian ini menerapkan proses pembacaan berulang dan perbandingan temuan antar studi. Temuan empiris dikaitkan dengan kerangka teori kesenjangan digital dan keadilan pendidikan. Pendekatan ini memastikan bahwa interpretasi hasil tidak bersifat deskriptif semata, tetapi memiliki dasar analitis yang kuat.

Metode kajian literatur sistematis ini memiliki keterbatasan pada ketergantungan terhadap kualitas dan cakupan studi yang tersedia. Namun, dengan seleksi sumber yang ketat dan analisis tematik yang terstruktur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran kebijakan publik dalam membentuk ketimpangan akses pendidikan digital pada masa pasca pandemi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Korpus Studi yang Dianalisis

Kajian ini menganalisis 32 publikasi ilmiah yang terbit pada periode 2020–2025. Seluruh studi membahas akses pendidikan digital dalam konteks kebijakan publik pasca pandemi Covid-19. Sebagian besar artikel menggunakan pendekatan empiris, baik kuantitatif, kualitatif, maupun mixed methods. Konteks geografis didominasi oleh negara berkembang, termasuk Asia, Amerika Latin, dan Afrika, dengan fokus pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Distribusi temporal menunjukkan peningkatan signifikan publikasi pada periode 2023–2025. Tren ini mencerminkan pergeseran perhatian akademik dari respons darurat pandemi menuju evaluasi keberlanjutan kebijakan pendidikan digital. Sebagian besar studi menempatkan kebijakan negara sebagai variabel utama yang memengaruhi akses, kualitas, dan keberlanjutan pembelajaran digital.

Bentuk Ketimpangan Akses Pendidikan Digital Pasca Pandemi

Temuan empiris menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan digital tidak bersifat tunggal. Studi-studi yang dianalisis mengidentifikasi setidaknya empat bentuk utama ketimpangan.

Pertama, ketimpangan infrastruktur digital. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan internet stabil dan perangkat digital masih sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Kelly dan Rutazihana (2024), Pettalongi et al. (2024), serta Wickert et al. (2021) menemukan bahwa siswa dari keluarga berpendapatan rendah memiliki probabilitas akses pembelajaran daring yang jauh lebih rendah dibanding kelompok menengah dan atas, bahkan setelah sekolah kembali dibuka.

Kedua, ketimpangan kapasitas literasi digital. Ojong (2025), Kallon (2023), dan Hanifah et al. (2025) menunjukkan bahwa akses perangkat tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan memanfaatkannya. Guru dan peserta didik di wilayah marginal menghadapi keterbatasan kompetensi digital, yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.

Ketiga, ketimpangan kebijakan antarwilayah. Genç Tetik dan Akın (2023), Souza (2023), serta Leigue et al. (2025) mengidentifikasi variasi besar dalam desain dan implementasi kebijakan pendidikan digital antar daerah. Wilayah dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang kuat cenderung mampu mempertahankan layanan digital pasca pandemi, sementara wilayah lain mengalami penurunan akses.

Keempat, ketimpangan berbasis kelompok sosial. Studi Prince Torres (2021; 2024), Althausen (2025), dan Hernández Suarez et al. (2023) menunjukkan bahwa siswa dari kelompok miskin, penyandang disabilitas, dan komunitas terpencil mengalami eksklusi digital yang bersifat struktural, meskipun terdapat kebijakan inklusif secara formal.

Peran Kebijakan Publik dalam Mereproduksi Ketimpangan

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan publik pasca pandemi memiliki dua kecenderungan utama. Sebagian kebijakan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan, sementara sebagian lain justru mereproduksinya.

Kebijakan berbasis respons darurat, seperti subsidi kuota internet jangka pendek dan pembelajaran daring wajib, terbukti efektif dalam menjaga kontinuitas pendidikan pada fase awal pandemi. Namun, Li (2024) dan Walters (2020) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak dirancang untuk jangka panjang. Ketika dukungan dihentikan, kelompok rentan kembali kehilangan akses.

Sebaliknya, kebijakan yang menempatkan pendidikan digital sebagai bagian dari reformasi struktural menunjukkan hasil yang lebih inklusif. Ali dan Katz (2024) serta Adako dan Ekundayo (2025) menemukan bahwa kebijakan berbasis data, dengan target kelompok rentan yang jelas, mampu mempersempit kesenjangan akses pendidikan tinggi dan pendidikan dasar.

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Namun, beberapa studi juga menunjukkan efek paradoks kebijakan. Hargreaves (2021) dan Kanashiro (2021) mengungkap bahwa kebijakan efisiensi anggaran dan desentralisasi pendidikan digital justru memperlebar ketimpangan antar sekolah dan antar wilayah. Sekolah dengan sumber daya terbatas tidak mampu mengikuti standar digital yang ditetapkan negara.

Sintesis Pola Empiris Lintas Studi

Sintesis temuan menunjukkan pola yang konsisten. Ketimpangan akses pendidikan digital pasca pandemi bukan semata akibat keterbatasan teknologi, tetapi akibat desain kebijakan yang tidak sensitif terhadap konteks sosial ekonomi.

Studi lintas negara menunjukkan bahwa negara yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan digital dengan kebijakan sosial mampu menekan eksklusi digital. Barros et al. (2023), Ramírez-Correa et al. (2025), dan Tang et al. (2024) menegaskan pentingnya koordinasi antara sektor pendidikan, telekomunikasi, dan perlindungan sosial.

Sebaliknya, kebijakan yang menyerahkan pembiayaan dan implementasi kepada rumah tangga dan sekolah memperbesar beban kelompok miskin. Song (2025) dan Digital Inequities and Digital Inclusion in Education (2022) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pasar mempercepat diferensiasi kualitas pendidikan.

Ringkasan Temuan Empiris Utama

Tabel berikut merangkum pola temuan empiris utama dari studi yang dianalisis.

No	Fokus Kebijakan Publik	Konteks Studi	Bentuk Ketimpangan Akses	Dampak Empiris yang Teridentifikasi
1	Subsidi akses internet dan perangkat digital	Negara berkembang	Akses internet tidak merata antar kelompok pendapatan	Penurunan partisipasi pembelajaran daring pada rumah tangga berpendapatan rendah
2	Digitalisasi pembelajaran sekolah	Wilayah perkotaan dan peri-urban	Perbedaan kualitas akses platform dan perangkat	Learning loss lebih tinggi pada sekolah dengan sumber daya terbatas
3	Desentralisasi kebijakan pendidikan digital	Lintas negara dan wilayah	Perbedaan kapasitas fiskal dan kelembagaan	Disparitas akses pendidikan digital antarwilayah meningkat
4	Kebijakan pendidikan digital inklusif	Pendidikan tinggi	Eksklusi mahasiswa dari kelompok sosial rentan	Peningkatan retensi dan partisipasi mahasiswa ketika kebijakan inklusif diterapkan
5	Integrasi kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial	Negara berkembang	Ketergantungan akses pada kondisi ekonomi rumah tangga	Penurunan kesenjangan akses pada wilayah dengan intervensi lintas sektor

Implikasi Kebijakan Berbasis Temuan

Berdasarkan hasil empiris, kebijakan pendidikan digital pasca pandemi perlu diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, pergeseran dari kebijakan darurat menuju kebijakan struktural jangka panjang. Kedua, penajaman target kebijakan pada kelompok sosial yang paling terdampak

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

ketimpangan. Ketiga, integrasi kebijakan pendidikan digital dengan kebijakan kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur.

Temuan ini menegaskan bahwa tanpa desain kebijakan yang berbasis bukti empiris dan sensitif terhadap ketimpangan, digitalisasi pendidikan berpotensi menjadi mekanisme baru reproduksi ketidaksetaraan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan digital pada masa pasca pandemi Covid-19 merupakan fenomena struktural yang sangat dipengaruhi oleh arah dan desain kebijakan publik. Hasil kajian literatur sistematis menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan tidak secara otomatis menciptakan pemerataan akses. Sebaliknya, tanpa intervensi kebijakan yang tepat sasaran, transformasi digital justru memperkuat ketimpangan sosial ekonomi yang telah ada.

Temuan empiris memperlihatkan bahwa ketimpangan akses pendidikan digital muncul dalam berbagai bentuk, meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, disparitas kapasitas kelembagaan antarwilayah, serta eksklusi kelompok sosial rentan. Kebijakan berbasis respons darurat yang dominan selama pandemi terbukti tidak berkelanjutan dan gagal menjamin akses jangka panjang bagi kelompok berpendapatan rendah. Ketika dukungan negara dikurangi, kesenjangan akses kembali melebar.

Sebaliknya, kebijakan publik yang dirancang secara berbasis data, berorientasi inklusi, dan terintegrasi lintas sektor menunjukkan potensi nyata dalam mengurangi ketimpangan. Studi-studi yang dianalisis menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan digital sangat bergantung pada koordinasi antara kebijakan pendidikan, kebijakan sosial, dan pembangunan infrastruktur digital. Pendekatan kebijakan yang menyerahkan beban pembiayaan dan adaptasi teknologi kepada rumah tangga dan sekolah terbukti memperbesar risiko eksklusi pendidikan.

Implikasi utama dari penelitian ini adalah perlunya pergeseran paradigma kebijakan pendidikan digital pasca pandemi. Negara perlu menempatkan akses pendidikan digital sebagai hak publik yang dijamin, bukan sebagai konsekuensi sampingan dari inovasi teknologi. Tanpa reformasi kebijakan yang berorientasi keadilan sosial, pendidikan digital berpotensi menjadi instrumen baru reproduksi ketimpangan, bukan sarana perluasan kesempatan belajar yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

Adako, O. P., & Ekundayo, T. F. (2025). Bridging the digital divide in education: Strategies for equitable access to technology in low-income communities. Environment & Social Psychology, 10(7). https://doi.org/10.59429/esp.v10i7.3671

Ahuja, V. (2023). Equity and access in digital education. In Advances in educational technologies and instructional design (pp. 1–22). IGI Global. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-1826-3.ch005

Ali, C., & Katz, V. S. (2024). Evidence-based pathways for leveling digital access in higher education during and beyond the COVID-19 pandemic. Journal of Information Policy, 14, 19–45. https://doi.org/10.5325/jinfopoli.14.2024.0019

Althausen, M. M. de O. (2025). Direito fundamental à educação e inclusão digital: Um estudo de caso sobre a qualidade da educação pública no contexto da emergência em saúde pública. Revista da Escola Superior da PGE-SP, 15(1). https://doi.org/10.22491/respge.v15i1.1643

Barros, M. J. de, Lima, P. P. de, Oliveira, D. M. P. de, & colleagues. (2023). Inclusão digital e educação: Equidade e acesso. Revista Ibero-Americana de Educação Contemporânea, 1(2).

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

https://doi.org/10.61571/riec.v1i2.120
De França, A. C., & Furlin, N. (2023). Educação e desigualdades digitais durante a pandemia da COVID-19: Análise da produção científica. Linguagens, Educação e Sociedade, 27(53). https://doi.org/10.26694/rles.v27i53.3667
Digital inequities and digital inclusion in education. (2022). In Education and digital transformation (pp. 1–18). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4023-0.ch015
El acceso a internet como derecho fundamental: La educación en tiempos de COVID-19. (2022). KAIRÓS, Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas. https://doi.org/10.37135/kai.03.09.08
Genç Tetik, E., & Akın, Z. (2023). Kamu politikası bağlamında dijital eğitim sunumu ve fırsat eşitliği: Ülke karşılaştırmaları. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi. https://doi.org/10.48066/kusob.1200594
Hanifah, Arnyana, I. B. P., & Margunayasa, I. G. (2025). Digital technology-based policy approaches to improve the quality and access of basic education in developing countries: A systematic literature review. International Journal of Education and Computer Studies, 5(2). https://doi.org/10.35870/ijecs.v5i2.4337
Hargreaves, A. (2021). Austerity and inequality; or prosperity for all? Educational policy directions beyond the pandemic. Educational Research for Policy and Practice, 20, 1–21. https://doi.org/10.1007/S10671-020-09283-5
Hernández Suarez, C. A., Jiménez Verdejo, J., & Rodríguez Moreno, J. (2023). Desigualdades en la educación superior en tiempos de COVID-19. Perspectiva. https://doi.org/10.22463/25909215.4153
Kallon, A. (2023). The digital divide in a global emergency: How technology is shaping academic performance in diverse communities. In IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.113923
Kanashiro, P. R. T. (2021). Exclusão digital, desigualdade e iniquidade: Ensaio sobre a educação pública em tempo de isolamento social. Olhar de Professor, 24. https://doi.org/10.5212/OLHARPROFR.V.24.16145.054
Kelly, A. M., & Rutazihana, P. N. (2024). Digital divide and its implications for education in the post-COVID-19 era in Sub-Saharan Africa. Innovation and Education, 6, Article 7. https://doi.org/10.1163/25248502-bja00007
Leigue, A. M. S. P., Santos, A. L. P., Silva, M. de S., & colleagues. (2025). Políticas públicas de inclusão na educação à distância. Observatorio de la Economía Latinoamericana, 23(4). https://doi.org/10.55905/oelv23n4-144
Li, X. (2024). Post-pandemic: Innovations in remote education and adjustments in public policy. International Journal of Social Sciences and Public Administration, 3(3). https://doi.org/10.62051/ijsspa.v3n3.50
Mourad, L. A. de F. A. P., & Sarturi, R. C. (2022). Teorizando políticas públicas: Um esforço introdutório. Editora Acadêmica. https://doi.org/10.51324/86010732.13
Ojong, A. S. (2025). Bridging the digital divide: Unmasking socioeconomic barriers to equitable access to digital tools in education. International Journal of Science and Research Archive, 15(1), 1143–1154. https://doi.org/10.30574/ijsra.2025.15.1.1143
Passey, D., Ntebutse, J. G., Abu Ahmad, M. Y., & colleagues. (2024). Populations digitally excluded from education: Issues, factors, contributions and actions for policy, practice and research in a post-pandemic era. Technology, Knowledge and Learning. https://doi.org/10.1007/s10758-024-09767-w
Pettalongi, S. S., Londol, M. M., & Umboh, S. E. (2024). Disparities in digital education: Socioeconomic barriers to accessing online learning resources. International Journal of Social and Human. https://doi.org/10.59613/be6gdv98

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Prince Torres, Á. C. (2021). La brecha digital como obstáculo al derecho universal a la educación en tiempos de pandemia. Revista de Educación y Sociedad. https://doi.org/10.47058/JOA4.3

Prince Torres, Á. C. (2024). Derecho a la igualdad, brecha digital y COVID-19: Experiencia latinoamericana educativa en secundaria para postpandemia. Foro Educacional, 42, 1–20. https://doi.org/10.29344/07180772.42.3693

Ramírez-Correa, P., Mariano, A. M., & Santos, M. R. (2025). Digital and sustainable education and social inclusion: A bibliometric review with the consolidated meta-analytical approach. Sustainability, 17(13), 5677. https://doi.org/10.3390/su17135677

Song, H. (2025). Different levels of access to digital technology have further exacerbated inequalities in education. International Journal of Education and Social Development. https://doi.org/10.54097/mg0rp720

Souza, V. de. (2023). Kebijakan berorientasi misi untuk mempromosikan teknologi digital dalam mengatasi ketimpangan pendidikan dan mendorong pembangunan inklusif di Brasil. Jejaring Administrasi Publik: Jurnal Ilmiah, 14(2). https://doi.org/10.20473/jap.v14i2.48736

Tang, Q., Kamarudin, S., Abdul Rahman, S. N., & colleagues. (2024). Bridging gaps in online learning: A systematic literature review on the digital divide. Journal of Education and Learning, 14(1), 161–175. https://doi.org/10.5539/jel.v14n1p161

Thapaliya, S., & Panta, S. (2025). Equity and access in tech-driven learning environments. International Journal of Research and Innovation in Social Science. https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.907000326

Walters, A. S. (2020). Inequities in access to education: Lessons from the COVID-19 pandemic. The Brown University Child and Adolescent Behavior Letter, 36(8), 1–3. https://doi.org/10.1002/CBL.30483

Wickert, L. B., Kieling, J. S., & Trindade, D. P. P. da. (2021). O acesso à internet em tempos de COVID-19: Garantia da igualdade material no direito à educação básica. Revista da Defensoria Pública do Distrito Federal, 3(2). https://doi.org/10.29327/2193997.3.2-5

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.